



## Kewenangan Kppu Dalam Melakukan Pengawasan Bisnis Online Di Indonesia

Sayyid Hasyeem Thorieq Al-Masyhur

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur  
Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum

---

### Abstract

Received: 26 Juli 2023  
Revised: 02 Agustus 2023  
Accepted: 07 Agustus 2023

*KPPU memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk menggunakan peraturan untuk mengawasi, menyetujui dan melaksanakan aturan dan praktik gangguan usaha. Dalam pengelolaan platform perdagangan virtual, KPPU memiliki perwakilan untuk penghindaran. KPPU juga bekerja untuk melindungi semua lembaga keuangan karena mereka selalu mengikuti jalur transaksi bisnis yang adil dan jujur. Dalam hal pembatasan, KPPU juga berhak memberikan nasihat dan pengawasan kepada otoritas yang berwenang untuk pelaksanaan pedoman atau perkembangan peraturan perundang-undangan tentang larangan monopoli dan pemberantasan perdagangan tidak sehat, terutama dalam ekonomi virtual. KPPU dapat dicirikan dengan pemberantasan praktik monopoli persaingan dagang tidak sehat, eksploitasi pemasok atau platform, perjanjian sejenis, predatory pricing, penguasaan posisi, dan sejenisnya menghadapi.*

**Kata Kunci:** Kewenangan KPPU, Pengawasan, Bisnis Online

(\*) Corresponding Author: [thorieqsayyid13@gmail.com](mailto:thorieqsayyid13@gmail.com)

**How to Cite:** Al-Masyhur, S. H. T. (2023). Kewenangan Kppu Dalam Melakukan Pengawasan Bisnis Online Di Indonesia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8264917>

---

### PENDAHULUAN

Revolusi jual beli 5.0 membudayakan habituasi terhadap bineka anggota tonggak kesibukan orang. Revolusi jual beli 5.0 menjadikan sambungan berbunga penyebaran sebelumnya. Revolusi jual beli diartikan serupa perniagaan fase perdana kepada materi-materi penting bagian dalam cais kausa buntut orang, sosial, perkataan nyawa dan peraturan ekonomi umum. Setelah menjelajahi penyebaran ekonomi 4.0, khususnya rakitan peraturan komputer dan internet kepada gerakan orang. Melanjutkan penyebaran ini, penyebaran 5.0 menggelorakan orang kepada nyawa bantu-membantu tambah internet bagian dalam merasai kesibukan sehari-hari. Indonesia diperkirakan akan menyelap ke bagian dalam lima besar. teknologi titik terendah depan perian 2045, bagaimanapun, kita kiamat akan memuat partikel-partikel penggunaannya. Salah tunggal mayapada di angkasa tambah fase pemakaian internet terbaik adalah Indonesia. Menurut kritik Badan Pusat Statistik (BPS) perian 2021, 62,10% umum Indonesia terkaan mengabdikan internet. Ini menyinggir bahwa periode dan kritik diterima, kekufuran satunya tercantol tambah gerakan keuangan. Ada perniagaan tata krama finansial berbunga tradisional ke virtual. Perubahan-transmutasi yang berorientasi secara dinamis bagian dalam penyerangan pasaran virtual juga berlaga depan konflik perusahaan bisnis yang

kelahirannya depan berlawanan pemeran jual beli dan juga mempunya depan penegakan hukum terhadap konflik perusahaan bisnis.

Teknologi virtual bisa dipahami serupa perniagaan perkataan pendekatan yang sebelumnya dilakukan secara historis menjelajahi pertualangan pasaran atau mengamalkan pendekatan yang dilakukan secara digital atau online.<sup>1</sup> Penyesuaian penting barang apa depan perkataan pendekatan bisa membuat aktivitas konflik yang tidak adil dan juga berlaga depan penegakan peraturan. Digitalisasi memasrahkan keadaan yang mengempik jumlah setiap pemeran inayat bisnis dan pengasas lembaga itu sendiri. Pelaku inayat dituntut kepada berevolusi ke mekanisme pasaran baru tambah memikirkan gelogok dan keleluasaan pasaran virtual. Sementara hal kelaliman mesti ditinjau kepada menukar dorongan pergantian berpegang virtual bagian dalam memijit konflik jual beli yang tidak adil dan bersaksi pemeran jual beli.

Kebijakan yang terdapat butuh mengamati semua anggota dan partikel strategis bagian dalam efektif berfungsinya mekanisme pasaran virtual. Hukum adalah perlengkapan yang menempatkan erti bab apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan tambah target kepada memelihara Anda berbunga munculnya konflik yang tidak adil yang menjabat tidak terduga. Keinginan ini mesti diperhatikan merayakan konstruksi dan mekanisme pasaran virtual waktu ini tidak lagi hidup seumpama pasaran tradisional. Perlawanan jual beli berharap kepada menazamkan kilat yang berguna jumlah seluruh tubuh anggota pemeran jual beli, dedikasi manusia maupun perusahaan. Pengawasan terhadap penolakan yang tidak berguna dilakukan menjelajahi suatu jawatan kuasa bayangkari penolakan bagian inayat, bagian dalam pola ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU. KPPU serupa kebiasaan mayapada yang tidak memboyong bagian dalam menjelmakan kewajibannya di zona penilikan konflik jual beli menjadikan pemain penting bagian dalam babak ini. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang membantar monopoli dan konflik inayat dagang tidak berguna menjabat pati tugas KPPU.

Nomenklatur tidak pola bagian dalam masalah merapikan kontes perniagaan tidak konstruktif di pasaran digital. Ini sanggahan kira KPPU. Konsumen dan jual beli harus menggenggam faedah berpangkal perdagangan digital. Namun, jika tidak tersua maksud yang spesifik kepada diikuti, itu upas bekerja bumerang. Peran dan eigendom pemain drama ekonomi dan pelanggan akan dijamin pakai konvensi dan statuta yang spesifik, menghalang kontes bisnis yang tidak konstruktif di pasaran digital. Persaingan jual beli di pasaran digital bermaksud inti sari sifat yang sepenuhnya menegah kontes tidak konstruktif. Hukum diperlukan kepada merapikan pekerjaan kebanyakan bagian dalam segala aspeknya, terhitung aliansi sosial, politik, kultur dan dampaknya terhadap perubahan ekonomi masa urusan bisnis.<sup>2</sup> Padahal, sifat sangat penting kepada menegah bentrokan kisi-kisi pusat dampak ekonomi karena substansi di esa faktor

---

<sup>1</sup> M. Armin Bin Ali, "PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DI NEGARA BERKEMBANG (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU DALAM PERKARA TEMASEK)," *Jatiswara*, vol. 31, no. 1, pp. 113–119, 2017.

<sup>2</sup> R. Manli, H. Kusmahan, and A. Afriana, "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum," *Padjajaran J. Ilmu Huk.*, vol. 3, no. 1, pp. 116–132, 2016.

dan nafsu pretensi atau dorongan yang tidak belakangi faktor lain. Jelas bahwa sifat berlaku penting bagian dalam mempergiat substansi kepada mengarang keselamatan kebanyakan.

Pertumbuhan waktu dan fakta yang bergerak cepat telah menyebabkan perkembangan di berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satunya adalah dalam pelatihan hal dan layanan lainnya. Jika sebelumnya bisnis jual beli lebih baik dilakukan secara tatap muka (contoh tradisional), kini mereka dapat melakukannya dengan cepat secara online melalui media internet. Sistem billing dan delivery yang awalnya diupayakan secara tidak langsung melalui vendor pihak ketiga, kini mulai mendorong pembayaran langsung dengan mengintegrasikan transaksi dengan pelanggan uang digital (cash/e-money). Bagi Edmon Makarim, model bisnis modern mengarah ke hutan semua pembelian di mana konvensi bisnis dapat mencakup kecepatan nyata, proses keuangan, dan barang.<sup>3</sup>

E-commerce atau bisa disingkat dengan e-commerce adalah bisnis yang meliputi pembeli, penyedia jasa dan pembeli perantara dengan menggunakan jaringan internet. Sederhananya, e-commerce adalah jual beli atau jual beli dan promosi transaksi online dengan menggunakan internet. Dengan menjalani e-bisnis ini, Anda dapat menikmati pertumbuhan yang cepat. Hal ini menjadikan e-commerce sebagai salah satu industri yang paling menjanjikan dalam hal bisnis internasional. Menurut A.T Kearney, jumlah penduduk yang hampir mencapai 240 juta orang pada tahun 2013 membuat pasar e-commerce Indonesia bernilai 1,3 miliar dolar. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi perusahaan e-commerce, yang dibuat dengan bantuan dokumen yang menunjukkan bahwa jumlah pelanggan mencapai 39 juta dan hampir 5 juta atau persen 12%, termasuk menggunakan Internet sebagai sarana bisnis.<sup>4</sup>

Meningkatnya variasi dan harga e-commerce akan mendukung sejumlah besar pembeli di daerah tersebut, yang diperkirakan akan meningkat. Dengan tumbuhnya berbagai perusahaan yang bekerja, persaingan antara perusahaan dan pasar terus menjadi agresif. Dalam hal ini akan membuat para pelaku bisnis berinovasi untuk menghasilkan lebih banyak produk, tentunya membayar tenaga dan bahkan keuntungan bagi produsen dan pelaku bisnis. Namun penentangan semacam ini harus diupayakan dengan cara yang baik dan murah agar tidak menimbulkan penentangan yang tinggi terhadap industri tidak sehat yang menghambat perekonomian negara. Seiring dengan maraknya perusahaan virtual, hal ini dapat membuka kemungkinan praktik perdagangan yang tidak adil. Persaingan yang tidak sehat dapat terjadi antar operator dalam sistem virtual maupun operator tradisional. Hariyadi Sukamdani, Presiden APINDO, mengatakan bahwa upaya berisiko pemerintah untuk memperkenalkan kenaikan fiskal dapat memicu oposisi yang serius. Secara umum, oposisi berbahaya ini ada antara pemilik bisnis tradisional dan startup atau startup. Hasil ini memberikan informasi dan fitur KPPU yang akan menyelamatkan Anda dari tindakan korporasi yang tidak adil yang mencakup diskriminasi, eksploitasi platform di penjual atau antar sistem,

---

<sup>3</sup> Edmon Makarim, "Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol.44, no. 3 (2013): hlm.293

<sup>4</sup> A.T.Kearney, "Lifting The Barriers of E-commerce in ASEAN", (CIMB ASEAN Research Institute), 2015, hlm 2

perjanjian khusus, pembayaran utang, penyalahgunaan perusahaan dan berbagai jenis. oposisi yang tidak adil.

Yang diketahui dengan bantuan Haryadi Sukamdani adalah sempat terjadi kerancuan antara PT Solving Transportasi Indonesia (Grab) dan PT Teknologi Transportasi Indonesia (TPI). Guntur Syahputra Saragih, Komisioner KPPU (Biaya Pemantauan Persaingan Usaha Tidak Sehat) berpesan jika menemukan oposisi yang tidak adil, cobalah GrabCar secara urut. GrabCar mendistribusikan pesanan kepada pengemudi di bawah dukungan TPI dari pengemudi independen sebagai mitra bisnis perusahaan travel online. Munculnya perusahaan jenis baru dengan model bisnis baru akan menimbulkan resistensi perusahaan jenis baru dalam upaya menghadapi perusahaan virtual dengan perusahaan tradisional. Persaingan antar pelaku bisnis pasti membuahkan hasil yang positif dan berkah bagi perbaikan finansial dan gaya hidup alternatif bagi konsumen untuk memilih produk yang diinginkan. Namun, jika oposisi yang tumbuh berdampak negatif pada cara hidup berbagai bisnis, itu akan membuat oposisi di luar kendali. Ini karena tidak ada undang-undang tentang oposisi perusahaan dan aktivitas virtual.

Di sisi lain, Kantor Persaingan Usaha (KPPU) memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk menggunakan peraturan untuk mengawasi, menyetujui dan melaksanakan aturan dan praktik gangguan usaha. Pelaksanaan tugas KPPU untuk mengawasi dan menegakkan aturan akan memperburuk masalah, karena kebutuhan penjara saat ini tidak sepenuhnya mengelola perlawanan industri yang dilakukan dengan menggunakan pekerja yang membuat bisnis.<sup>5</sup> Oleh karena itu, menarik bagi penulis untuk mengetahui lebih jauh tentang pengawasan dan pelaksanaan undang-undang yang akan dibuat KPPU untuk memenuhi ketentuan UU No. bisnis game yang termasuk bisnis virtual/e-business yang berpotensi memanfaatkan bisnis tradisional untuk menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>6</sup> Berdasarkan rincian sejarah di atas, kompleksitas utama dalam penyidikan adalah kesediaan KPPU untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan platform virtual/e-commerce berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan tidak sehat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Teori adalah ide atau tesis tentang situasi atau topik yang digunakan sebagai analogi.<sup>7</sup> Itu mungkin atau mungkin tidak ditempatkan, tetapi digunakan sebagai entri untuk mengatur urutan dalam teks. Konsep yang digunakan dalam pengujian ini membangun mesin yang menganalisis hasil pencarian, membuat prediksi atau prediksi berdasarkan hasil, dan menunjukkan pemahaman dalam situasi tertentu untuk menyelesaikan masalah. Konseptualisasi yang kompleks ini adalah penjelasan logis yang menggambarkan pengalaman dalam kerangka materi dan menyerukan penempatan statistik kritis sebagai kebenaran.<sup>8</sup> Meningkatkan

---

<sup>6</sup> Budi Kagramanto Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggrain, Kurnia Toha, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017)

<sup>7</sup> H. A. Santoso, "PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM TEORI GUSTAV RADBRUCH DALAM PUTUSAN PKPU 'PTB,'" *Jatiswara*, vol. 36, no. 3, pp. 325–334, 2021.

<sup>8</sup> M. Muslih, "NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Legalitas*, vol. IV, no. 1, pp. 130–152, 2013.

teknologi kontrol sangat bergantung pada ide, kemudian pada metode, studi, dan pemikiran sosial.

Hancurkan pasar virtual dengan hukum internasional. Tampaknya selama pasar virtual yang menyertakan 0,33 peristiwa, ini adalah jarak teknis. Secara umum, penalaran adalah penelitian terbaik dalam menilai. Teori Gustav Radbruch digunakan dalam tes ini. Keadilan, kesempatan dan literasi penjara adalah 3 (tiga) tujuan penjara dari filosofi ini.

Bertindak sebagai alat untuk mempromosikan hiburan manusia di antara warga negara, hukum memiliki alasan. Karena hukum dibuat dengan memastikan hak dan kewajiban masing-masing lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara. Selain itu, hukum yang diperlukan dalam peradilan penjara adalah proses pengaduan. Mengacu pada kajian tersebut, diperlukan sebuah undang-undang untuk menghindari paket oposisi yang tidak adil dengan karakteristik unik di pasar virtual.

Jika perlindungan hiburan rakyat terkait dengan penggunaan hukum, maka alasan organisasi tidak dapat dihindari untuk dicapai. Tentang kehidupan masyarakat, Soedjono Dirdjosisworo mencontohkan, hiburan masyarakat bisa mengubah atau mengaturnya. Oleh karena itu, undang-undang ini tampaknya melindungi hiburan tersebut.<sup>9</sup> Penyelenggaraan hiburan antar pelanggan dan antar konsumen selalu dikelilingi oleh standar sehingga keadilan dapat dilakukan.

Konsep ini juga digunakan untuk membaca sebab-sebab hukum berupa realitas karceral. Hukum kebenaran masuk akal jika ada kebijakan yang membuat orang mengetahui apa hak dan tanggung jawab mereka dan memahami apa yang dapat diterima dan apa yang tidak dapat diterima dan menegakkan jenis pasar. Jika fakta penjara ini mengarah pada banyak hiburan yang tidak memiliki dasar implementasi, maka mesin dengan implementasi berada di bawahnya. Jika dalam penelitian ini dilihat dari segi keberkahan lapas dan perbatasan serta perlindungan pelaku ekonomi sebagai pelaku pembangunan sistem hukum pasar maya dapat kita dapatkan hal tersebut. Oleh karena itu, jika penjara kebenaran bekerja dengan menunjukkan hukum dan apa yang akan diterapkan dalam bisnis yang dapat mengikuti aturan dan mendistribusikan berkah dan aktivitas di pasar virtual. Rangkuman konsep di atas digunakan untuk membaca bagaimana KPPU melakukan kontrol terhadap pengelolaan oposisi perdagangan di pasar virtual dan bagaimana penerapan KPPU bekerja sama dengan pemerintah dalam pengelolaan oposisi perdagangan di pasar virtual.

Keadilan dan kebenaran penjara digunakan dalam pembacaan Undang-Undang Pemerintah 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Dengan Sistem Elektronik dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam mempertimbangkan hal-hal yang akan dicapai keadilan melalui pelaksanaannya. hukum. dari UU Pasar Digital. Berlawanan dengan fakta penjara dapat digunakan untuk membaca keinginan di bawah normatif untuk menentukan nilai oposisi perusahaan terhadap pasar virtual.

---

<sup>9</sup> M. Julyano and A. Y. Sulistyawan, "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM," *J. Crepido*, vol. 01, no. 1, pp. 13–22, 2019

Misi KPPU adalah untuk menyelidiki penggunaan tindakan pencegahan yang tidak adil oleh perusahaan dan pasar virtual untuk mempelajari dan mengevaluasi penggunaan konsep penjara kebenaran dan nilai sebagai kelompok yang tidak memihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hak dan tanggung jawab masing-masing pemain dan perusahaan yang mendukung pemasaran virtual.

## **PEMBAHASAN**

### **KPPU dan Perannya dalam Pengawasan Layanan Digital**

Pertumbuhan keuangan global telah memengaruhi model bisnis dan proses bisnis serta permainan bisnis. Kemajuan teknologi memperkenalkan jenis perusahaan baru yang menggunakan produksi sebagai basis utama bisnis, saling memberi dan membayar. Munculnya jenis bisnis baru antara penjual dan pembeli telah mengacaukan semua proses yang diatur oleh hukum yang menghilangkan hubungan antara keduanya. Peluncuran badan usaha baru memang menjadi topik utama dari berbagai program, untuk mendorong pemerataan di badan usaha agar membawa berkah dan kegiatan terkait, itulah yang menjadi fokus KPPU sebagai raja. rapat .permainan perusahaan bekerja dengan baik. membantu.

Dalam kerangka hukum Indonesia, KPPU dapat digolongkan sebagai badan anak kerajaan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengeluarkan perintah terhadap pelaku usaha.<sup>10</sup> Di sisi lain, KPPU sebagai lembaga khusus dengan tantangan yang tidak lagi menghasilkan pasal-pasal yang efektif dan oposisi komersial cenderung memberikan peluang oposisi komersial. KPPU juga merupakan organisasi yang tidak memihak yang tidak dapat dipanggil oleh otoritas manapun, dan tidak selalu bertanggung jawab untuk menetapkan undang-undang tentang persaingan usaha tidak sehat. Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga memberdayakan KPPU untuk menyampaikan pendapat dan menindak pelaku usaha yang melakukan perlawanan tidak sehat.

Pasal 1 (18) UU No. 5 Tahun 1999 menentukan apakah KPPU adalah pajak yang dilarang untuk mengawasi pelaku olahraga dan organisasi olahraga agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Kerja KPPU diatur dalam pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa KPPU bertanggung jawab untuk:

- a. Menginvestigasi permainan industri dan tindakan pimpinan perusahaan yang dapat mengarah pada perlindungan praktik monopoli dan praktik industri tidak sehat.
- b. Melanggar perjanjian yang dapat mengakibatkan terbentuknya praktek monopoli dan praktek industri yang tidak adil.
- c. Menghancurkan penilaian tentang apakah itu akan melakukan fungsi yang paling penting atau tidak, yang dapat mengarah pada perlindungan perilaku monopolistik.
- d. Oposisi bisnis yang tidak adil dikeluhkan sebagaimana disetujui oleh Komisi
- e. Bagikan panduan pemerintah tentang masalah hukum yang terkait dengan praktik monopolistik atau praktik perusahaan yang tidak adil.
- f. Menyetujui instruksi atau pedoman yang berkaitan dengan standar ini.

---

<sup>10</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2014, hlm 360

g. Membagikan hasil kajian berkala KPU kepada Presiden dan DPR.

Peran KPPU sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini adalah untuk mendistribusikan kewenangan untuk mengawasi setiap kegiatan bisnis yang terdaftar di platform virtual. Di bawah sistem perdagangan virtual, KPPU memiliki asisten penanggulangan yang bertanggung jawab untuk menjaga sistem perdagangan virtual dengan mengelola karakter set yang dilihatnya. Dalam hal pembatasan, KPPU juga berhak memberikan saran dan perhatian kepada otoritas yang berwenang dalam pelaksanaan atau pengembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan monopoli dan anti perdagangan. wilayah. KPPU dalam perannya sebagai badan yang tidak memihak juga memenuhi perannya sebagai pengamat dengan mengawasi proses perusahaan dan oposisi perusahaan dalam ekonomi virtual. Terhadap berbagai bentuk perlawanan pelaku usaha ilegal, KPPU dapat melakukan pengawasan, seperti dalam kasus challenge taksi internet yang telah diuji coba oleh Go-Jek dan Grab. KPPU dapat mengatur hubungan sosial di dalam kelompok, termasuk dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

#### **Penegakan Hukum melalui KPPU dan Program Bisnis Digital**

Melalui undang-undang antimonopoli, bisnis virtual atau e-commerce dapat memungkinkan konsumen membuat beberapa situs web sebagai pengganti bisnis dan menawarkan harga yang sama di setiap situs web memiliki tampilan unik bagi pelanggan untuk membeli produk yang ditawarkan. mereka. mencerminkan konsep-konsep di atas." adalah nilai pasar.<sup>11</sup> Pelaku yang melakukan kegiatan komersial di luar wilayah hukum Indonesia tidak dilindungi UU Pelaku, sehingga KPPU tidak dapat bertindak. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki undang-undang bisnis yang komprehensif agar KPPU dapat mengawal pelaksanaannya tidak hanya bagi pengusaha yang bermain di Indonesia, tetapi juga bagi pengusaha yang berinvestasi di luar negeri, tetapi latihan kinerjanya mempengaruhi bisnis perusahaan.

Di sisi lain, contoh juga mempengaruhi keputusan tentang posisi operator perusahaan di wilayah tempat bisnis dilakukan. Di sisi lain, dalam bisnis virtual, seseorang dapat bertindak sebagai pembeli selain sebagai pembeli, sehingga dapat terjadi keputusan yang sulit antara pembeli dan penjual dan klien. Dalam perusahaan virtual, musuh bisnis yang salah adalah hidup menyendiri. KPPU dapat menunjukkan melalui anti-pembatasan seperti praktik monopoli persaingan tidak sehat perusahaan, eksploitasi platform untuk pemasok atau antar konstruksi, perjanjian khusus, harga predator, ketentuan tata kelola, selain berbagai bentuk tata kelola perusahaan yang tidak adil.<sup>12</sup> Tren digital dapat mencegah serangan baru dari platform virtual. Pemasok besar memiliki kemampuan untuk mengendalikan pasar dan konsumen dengan meningkatkan hambatan masuk bagi pemasok yang berbeda. Biaya digital yang berbeda dapat digabungkan, sementara penyedia layanan meningkatkan bisnis mereka melalui integrasi berbagai struktur. Dengan cara ini,

---

<sup>11</sup> Dewa Gede Satriawan, *Hukum Transaksi E-Commerce di Indonesia*, Surabaya: Jakad Publishing, 2019, hlm 14

<sup>12</sup> Dewa Gede Satriawan, *Hukum Transaksi E-Commerce di Indonesia*, Surabaya: Jakad Publishing, 2019, hlm 47

penyedia akan menjadi yang memegang kendali dan dapat mengontrol vendor yang berbeda.

Selain itu, hanya dengan satu orang, penyedia juga dapat menyediakan kunci. dia mencoba membuat platform yang menyimpan uang di penjual, tetapi pada saat yang sama membuat kunci untuk pelanggan. Jika pembeli mentransfer bangunan ke penerbit lain, harga tetap dapat dinaikkan sebagai cara mudah untuk melewati hak pembeli untuk memilih dan beralih ke platform apa pun lagi. Ketergantungan ini hampir bertentangan dengan prinsip persaingan dimana perusahaan berusaha untuk menjamin keamanan pelanggan dan perusahaan yang bertindak untuk menciptakan bisnis internasional yang baik dan hak pelanggan untuk mendapatkan produk seperti yang mereka inginkan. Untuk melindungi oposisi perdagangan yang jujur dan bisnis virtual, KPPU dapat mengkaji keberadaan oposisi perdagangan dengan mencegah perilaku monopoli dan menemukan pasokan perusahaan tertentu dengan maksud memasuki pasar dengan cara yang berbeda. KPPU juga dapat mengindikasikan peluang eksploitasi dari vendor kepada pelanggan atau vendor lain itu sendiri.

KPPU juga bisa mengusut kemungkinan permainan harga daging, terutama ketika sistem atau pedagang menjual produk dengan harga murah. Di sisi lain, KPPU juga dapat berbagi instruksi dan permasalahan dengan otoritas yang membidangi e-commerce dan e-commerce terkait keputusan pengendalian bisnis game di Indonesia. Dalam penegakan hukum, banyak kasus seperti sengketa perdagangan ilegal dilaporkan melalui penyidikan dan penuntutan dengan bantuan KPPU. Terkait dengan game berbasis digital, salah satu jenis layanan yang menjadi perhatian KPPU adalah layanan travel online. Terkait dengan upaya tersebut, KPPU menilai masih ada waktu untuk menetapkan tarif yang dianggap tidak wajar.

Salah satu persoalan penyangkalan bisnis tidak adil yang diselesaikan di KPPU adalah persoalan Grab yang harus mampu menciptakan alat pendukung yang berguna di organisasi mana pun. Diketahui, mitranya PT Teknologi Transportasi Indonesia (TPI) telah memprediksi akan memiliki SIM online dengan mengutamakan driver anggota PT TPI lainnya untuk mendapatkan akses unik guna menarik para pemudik dengan membandingkannya dengan pihak lain. Perilaku kompetitif. Commission de Surveillance de la Concurrence des Entreprises, badan anti-trust untuk perusahaan komersial dengan banyak fungsi, kini bukan lagi lembaga yang paling efektif untuk menangkap dan menindak mereka yang melanggar praktik monopoli dan persaingan tidak sehat pusat bisnis, sangat bagus . cara penyusunan undang-undang persaingan usaha, KPPU juga memiliki tanggung jawab yang diatur dalam pasal 35 huruf e undang-undang persaingan usaha, yang berbunyi sebagai berikut: *it's an fair trade war*".

Peran KPPU adalah memberikan nasihat tentang kebijakan hukum dan peraturan yang berdampak pada pengembalian pasar. Ini adalah upaya yang sangat ambisius dan dipikirkan dengan matang untuk pengembangan lingkungan antimonopoli yang jujur yang akan dicapai melalui penggunaan Undang-Undang Persaingan Usaha, dan sebagai lembaga antimonopoli adalah KPPU untuk membangun pekerjaannya di sini. Munculnya praktik perdagangan yang tidak sehat sering terjadi karena peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang bagi konsumen untuk bertindak melawan persaingan. Misalnya masalah kartel di sektor ayam, setelah dikatakan ada undang-undang dan penguasa menjadi peluang bagi



pengusaha yang main-main melawan lawan. Pada level inilah pekerjaan penasehat hukum KPPU dapat diterapkan untuk memahami akses kepada otoritas, dan pengembangan standar yang baik bagi oposisi perusahaan yang jujur. 15 KPPU telah melakukan tugasnya dengan baik dalam memberikan nasihat kepada pihak yang berwenang, namun sangat disayangkan bahwa petunjuk dan saran tersebut diberikan dengan bantuan KPPU ketika mereka mencoba membuat sesuatu yang bertentangan dengan keinginan oposisi. Saat ini, undang-undang persaingan usaha tidak lagi pada tempatnya di mana KPPU wajib mengeluarkan pedoman dan arahan tersebut. Namun demikian, dalam situasi ini pimpinan KPPU juga dapat memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penguasa yang mempengaruhi gerak atau gagasan di bidang pembinaan usaha yang dapat menimbulkan sengketa perdagangan yang tidak adil, dan sebaliknya penguasa juga dapat memberikan bimbingan dan permasalahan. KPPU dan pelatihan perdagangan oposisi perdagangan.<sup>13</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis di atas, pengelolaan perusahaan dagang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan ketentuan lain dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dianggap bahwa pelaku komersial asing bermaksud untuk menyelidiki apakah pelaku komersial asing dapat menjadi pelaku komersial. Juga, ini tidak dipertimbangkan dalam pedoman hari ini. Jika hal tersebut merupakan hambatan bagi KPPU dalam melakukan pengawasan. Di atas dan di bawah, penciptaan tempat untuk mempertahankan pasar virtual dengan membuat persiapan sui generis yang meningkatkan penetrasi KPPU menjadi hal yang mendesak.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa KPPU dapat menunjukkan persentase dan perhatian kepada otoritas dan regulator yang memungkinkan untuk membuat pedoman dan tingkat regulasi di pasar virtual yang dapat memperkuat peran KPPU dalam pengelolaan pegawai badan usaha asing. dan pasar virtual yang buruk. konsekuensi bagi sistem ekonomi Indonesia. dan pertimbangan lain yang harus diperhatikan dalam pengembangan standar.

Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Dagang (KPPU) dalam mendukung penentangan yang jujur terhadap industri perunggasan telah memenuhi perannya sebagai tugas dan wewenang yang diberikan pemerintah melalui undang-undang persaingan dagang, sebagai perusahaan yang berbeda, ada juga faktor yang berpura-pura menjadi diperlukan. KPPU berusaha mencegah penentangan terhadap upaya kesehatan udara yaitu:

- a. Menyelidiki kartel yang ditargetkan yang dapat mengarah pada pembentukan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat oleh industri perunggasan dan mengatasi masalah yang terkait dengan inisiatif ini sebagai litigasi yang tidak adil.
- b. Menyalurkan saran dan perhatian kepada otoritas regulasi terkait dengan tindakan kelompok terhadap perdagangan tidak sehat di sektor perunggasan sebagai kelompok yang dikendalikan pemerintah. Dari hasil penelitian yang

---

<sup>13</sup> Susanti Adi Nugroho, Op. Cit, hlm. 554.

telah penulis selesaikan tentang penempatan Organisasi Perlawanan Industri (KPPU) dalam mendorong stabilitas industri di sektor perunggasan, penulis ingin menyampaikan beberapa poin seperti berikut ini:

- c. KPPU dalam hal penyelesaian masalah ingin memperluas agar kendala yang terjadi selama ini dalam hal permasalahan yang resisten terhadap perusahaan tidak menjadi hambatan.
- d. Peran KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 35 (e) UU Persaingan Usaha juga berjalan untuk menjangkau para pelaku yang sudah melakukan kegiatan usaha yang baik, sehingga KPPU terhindar dari perilaku monopoli dan oposisi perdagangan negatif.
- e. KPPU mengalami kesulitan untuk berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk menyusun peraturan perundang-undangan dan undang-undang yang akan mencegah atau mengurangi praktek monopoli dan praktek usaha tidak sehat karena undang-undang tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- f. Mengoperasikan peternakan unggas dengan sistem anggaran tertutup dan memperkuat ikatan ekonomi dan pangan dengan bergabung atau memiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang perunggasan.

Dalam pengelolaan platform perdagangan virtual, KPPU memiliki perwakilan untuk penghindaran. KPPU juga bekerja untuk melindungi semua lembaga keuangan karena mereka selalu mengikuti jalur transaksi bisnis yang adil dan jujur. Dalam hal pembatasan, KPPU juga berhak memberikan nasihat dan pengawasan kepada otoritas yang berwenang untuk pelaksanaan pedoman atau perkembangan peraturan perundang-undangan tentang larangan monopoli dan pemberantasan perdagangan tidak sehat, terutama dalam ekonomi virtual. KPPU dapat dicirikan dengan pemberantasan praktik monopoli persaingan dagang tidak sehat, eksploitasi pemasok atau platform, perjanjian sejenis, predatory pricing, penguasaan posisi, dan sejenisnya menghadapi. Dalam hal penegakan hukum, banyak persoalan yang dapat digambarkan sebagai penolakan yang tidak wajar dari lembaga penyidik terhadap proses peradilan dengan bantuan KPPU. Salah satunya adalah masalah yang diharapkan Grab untuk menciptakan alat kemitraan yang menguntungkan salah satu mitranya.

Analisis resistensi perusahaan di bidang e-commerce membuatnya lebih kompleks di lingkungan daripada konvensi bisnis. Oleh karena itu, kebijakan khusus untuk e-commerce harus tetap dalam persyaratan pembatasan perdagangan Indonesia. Selain itu, kebijakan yang membuang asas ekstrateritorialitas dan sistem oposisi perusahaan bisnis Indonesia juga merupakan faktor penting yang akan segera ditempuh dalam konteks oposisi hukum terhadap perusahaan bisnis di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Edmon Makarim, "Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol.44, no. 3 (2013): hlm.293
- A.T.Kearney, "Lifting The Barriers of E-commerce in ASEAN", (CIMB ASEAN Research Institute), 2015, hlm 2

- Budi Kagramanto Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggrain, Kurnia Toha, Hukum Persaingan Usaha (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017)
- H. A. Santoso, “PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM TEORI GUSTAV RADBRUCH DALAM PUTUSAN PKPU ‘PTB,’” *Jatiswara*, vol. 36, no. 3, pp. 325–334, 2021.
- M. Muslih, “NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Tiga Nilai Dasar Hukum),” *Legalitas*, vol. IV, no. 1, pp. 130– 152, 2013.
- M. Julyano and A. Y. Sulistyawan, “PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM,” *J. Crepido*, vol. 01, no. 1, pp. 13–22, 2019
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2014, hlm 360
- Majalah Kompetisi Edisi 62/2018, Meraup Pasar E-Commerce*, [kppu.co.id](http://kppu.co.id), hlm 50, diakses pada kamis 12 Maret 2020.
- Dewa Gede Satriawan, *Hukum Transaksi E-Commerce di Indonesia*, Surabaya: Jakad Publishing, 2019, hlm 14
- Dewa Gede Satriawan, *Hukum Transaksi E-Commerce di Indonesia*, Surabaya: Jakad Publishing, 2019, hlm 47
- Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit*, hlm. 554.  
/jtm/ta aa020